

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012

Perekonomian Jawa Timur sejak tahun pertama RPJMD 2009-2014 terus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dari 5,01% tahun 2009, 6,68% tahun 2010 dan 7,22% tahun 2011 serta pada tahun 2012 mencapai pertumbuhan sebesar 7,27%. Secara absolut kinerja ekonomi Jawa Timur sebagaimana diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 menunjukkan peningkatan yang signifikan (Tabel 3.1). Pada tahun 2009 PDRB Jawa Timur ADHB sebesar Rp. 686,85 triliun, tahun 2010 Rp. 778,56 triliun, tahun 2011 Rp. 884,14 triliun dan tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 1.001,72 triliun.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012

Keterangan	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	686.848	778.566	884.144	1.001.720
2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	320.861	342.281	366.984	393.674
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Perekonomian Jawa Timur tahun 2012 tumbuh sebesar 7,27%, lebih cepat dibandingkan tahun 2011 dan lebih cepat pula dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23%. Pertumbuhan ekonomi 2012 tersebut didukung oleh tiga sektor dominan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan pertanian.

Disamping kinerja pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami percepatan selama tahun 2012, kondisi makro ekonomi lain dari instrumen Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi menunjukkan stabilitas makro ekonomi yang cukup baik dengan indeks kumulatif Januari-Desember 2012 yang mencapai 4,5%. Walaupun inflasi Jawa Timur diatas nasional sebesar 4,30%, namun masih berada pada frame

target RKPD 2012 yaitu 5 ± 1 %. Kondisi IHK tersebut masih menunjukkan adanya insentif bagi pelaku ekonomi baik produsen dan konsumen sehingga merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,27%. Inflasi Jawa Timur sebesar 4,5% tersebut didorong oleh naiknya beberapa harga barang, seperti daging sapi, rokok kretek filter, gula pasir, bawang putih, emas perhiasan, tarif angkutan udara, tempe dan tahu mentah.

Kinerja investasi sampai dengan tahun 2012 mengalami progress yang cukup menggembirakan. Total investasi pada tahun 2012 baik PMA, PMDN dan Investasi Daerah mencapai 133,43 Trilyun Rupiah, meningkat 20,78 % dibanding tahun 2011 sebesar 110,47 Trilyun Rupiah, terdiri dari investasi PMDN meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 41,32 % dari 20,33 Trilyun Rupiah tahun 2011 menjadi 28,73 Trilyun Rupiah tahun 2012, investasi PMA meningkat 25,21 % dari 20,07 Trilyun Rupiah pada tahun 2011 menjadi 25,13 Trilyun Rupiah pada tahun 2012, dan Investasi Daerah pada tahun 2012 sebesar 79,57 Trilyun Rupiah. Di tingkat nasional Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan kontribusi PMDN sebesar 23,30 %, sedangkan PMA naik dari peringkat lima ke peringkat empat dengan kontribusi sebesar 9,40%. Investasi tersebut tersebar di 67.508 unit usaha yang menyerap 319.225 tenaga kerja.

Pada tahun 2012 ekspor dan impor Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Ekspor tumbuh sebesar 11,55 % dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 5,66 %. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa komoditas seperti tembaga, rokok, kimia organik, kertas dan karton, kayu dan barang dari kayu serta ikan dan udang masih menjadi andalan ekspor Jawa Timur. Sementara impor tumbuh sebesar 9,82 % dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 4,58 %. Permintaan Jawa Timur atas barang dari luar terutama masih didorong oleh impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong.

Nilai Ekspor keluar provinsi sebesar Rp. 301,48 trilyun dan ekspor ke luar negeri sebesar Rp. 222,17 trilyun, sehingga total ekspor tahun 2012 sebesar Rp. 523,66 trilyun atau naik 1,74 % dari tahun 2011. Kinerja Impor, untuk impor dari luar provinsi Rp. 238,63 trilyun dan impor dari luar negeri Rp. 234,57 trilyun, sehingga total impor tahun 2012 sebesar Rp. 473,21 trilyun atau naik 15,54 % dari tahun 2011. Dengan melihat kinerja ekspor dan impor tersebut terlihat bahwa Jawa Timur mengalami surplus sebesar 50,451 triliun. Struktur impor

pada tahun 2012 adalah 85,74 % merupakan bahan baku/penolong, 7,33 % barang modal dan 6,93 % merupakan barang konsumsi. Impor bahan baku/penolong mengalami kenaikan sebesar 9,93 %, barang modal mengalami penurunan 9,35 % dan barang konsumsi naik 0,30 % dibandingkan tahun 2011.

Selanjutnya kinerja perbankan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Jawa Timur, pada triwulan IV-2012, menunjukkan perkembangan kinerja yang positif, antara lain (a) Aset Bank Umum dan BPR tumbuh sebesar 20,79% (yoy) antara lain dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tahun 2012 mencapai Rp. 293,98 Trilyun atau tumbuh 16,48 % , (b) pertumbuhan kredit Bank Umum dan BPR yang mencapai 26,18% (yoy) dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencapai 83,48 % dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) mampu terjaga di bawah 5% yaitu 1,94. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan kredit yang terus meningkat dan bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, maka peluang sumbangan sektor perbankan atas peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan akan meningkat (Bank Indonesia, 2013).

Sementara itu, khusus untuk perkembangan kredit UMKM, menunjukkan peningkatan nilai kredit dari 62,34 Trilyun rupiah pada tahun 2011 menjadi 68,53 Trilyun rupiah dengan NPL sebesar 3,63 %. Dengan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa UMKM sebagai pendukung terbesar kinerja ekonomi Jawa Timur, dari instrumen keuangan dimaksud, kedepan UMKM dapat lebih berperan optimal dalam membangun pondasi kekuatan ekonomi riil Jawa Timur dalam menyediakan kesempatan kerja maupun dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sebagai ilustrasi kinerja perbankan di Jawa Timur disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Perbankan (Bank Umum & BPR) di Jawa Timur								
INDIKATOR BANK UMUM DAN BPR	2011				2012			
	TW I	TW II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Total Aset (Triliun Rupiah)	262.29	276.41	287.12	299.63	311.21	330.24	350.68	361.92
Pertumbuhan (yoy %)	15.30	15.87	16.43	17.33	18.65	19.47	22.13	20.79
Pertumbuhan (qtq %)	2.71	5.38	3.88	4.36	3.86	6.11	6.19	3.21
Dana Pihak Ketiga (Triliun Rupiah)	218.52	228.35	235.87	252.42	256.99	266.63	278.40	293.98
Pertumbuhan (yoy %)	12.45	13.85	14.70	16.37	17.60	16.77	18.03	16.46
Pertumbuhan (qtq)	0.74	4.50	3.29	7.02	1.81	3.76	4.41	5.60
Kredit (Triliun Rupiah)	165.41	176.37	184.37	194.50	197.91	215.64	229.31	245.42
Pertumbuhan (yoy %)	22.05	19.71	20.45	22.07	19.65	22.26	24.38	26.18
Pertumbuhan (qtq)	3.81	6.63	4.53	5.49	1.75	8.96	6.34	7.02
LDR (%)	75.69	77.24	78.16	77.05	77.01	80.87	82.37	83.48
NPL (%)	3.41	3.59	3.50	2.92	3.00	2.77	2.68	1.94

Sumber: Bank Indonesia

Instrumen makro ekonomi lain perihal masalah ketenagakerjaan, indikator terukur yang menjadi target RPJMD 2009-2014 maupun RKPD 2012 mampu direalisasikan dengan cukup baik. Pada bulan Agustus tahun 2011 pengangguran terbuka sebesar 4,16%, pada bulan Februari 2012 turun menjadi 4,14 % dan pada bulan Agustus turun kembali menjadi 4,12 %. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian adalah dari 19,08 juta orang yang bekerja pada bulan Agustus 2012 mayoritas didominasi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 10,50 juta orang (55,05 %), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma ke atas hanya sekitar 1,31 juta orang (6,88 %).

3.3.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Tahun 2012 Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2012, ekonomi Jawa Timur terus mengalami percepatan tumbuh 7,27 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,06 % dengan capaian pertumbuhan sebesar 3,20 %. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,65 % dengan capaian pertumbuhan sebesar 0,73 %. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,01 % dengan capaian pertumbuhan 0,44 %. Pertumbuhan sektor konstruksi di Jawa Timur cukup tinggi yaitu sebesar 7,05 % dengan capaian pertumbuhan 0,23 %, hal ini didorong karena semakin menggeliatnya kelompok ekonomi menengah dan gencarnya penawaran paket kredit properti dengan suku bunga rendah.

Sementara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian walau hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 6,35 % dan 3,49 %, tetapi keduanya memberikan sumbangan pertumbuhan cukup besar yakni 1,60 % dan 0,50 %. Hal ini mengindikasikan bahwa tiga sektor ekonomi utama Jawa Timur masih dimotori oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pertanian, yang sumber pertumbuhannya mencapai 5,30 %.

Tabel 3.3
Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2012 (%)

Sektor	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,49
2. Pertambangan & Penggalan	6,92	9,18	6,08	2,10
3. Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,35
4. Listrik, Gas & Air Bersih	2,72	6,43	6,25	6,21
5. Konstruksi	4,25	6,64	9,12	7,05
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,58	10,67	9,81	10,06

7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,98	10,07	11,44	9,65
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	5,30	7,27	8,18	8,01
9.	Jasa-jasa	5,76	4,34	5,08	5,07
PDRB		5,01	6,68	7,22	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2012 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang kontribusi ketiganya sebesar 72,93 %, agak meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 72,49 %. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, terutama disebabkan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,41 % dan sektor pertanian sebesar 0,04 % sedangkan kontribusi beberapa sektor lain menurun. Kontribusi sektor konstruksi turun dari 4,67 % menjadi 4,55 %; sektor listrik, gas dan air bersih turun dari 1,43 % menjadi 1,35 %; dan sektor jasa-jasa turun dari 8,55 % menjadi 8,35 %. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor *non tradable goods* seirama dengan perkembangan sektor-sektor riil.

Tabel 3.4
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2012 (%)

Sektor	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	16,39	15,75	15,38	15,42
2. Pertambangan & Penggalian	2,17	2,19	2,24	2,08
3. Industri Pengolahan	28,04	27,49	27,12	27,11
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,82	1,51	1,43	1,35
5. Konstruksi	3,40	4,49	4,67	4,55
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	29,44	29,47	39,99	30,40
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,69	5,52	5,66	5,70
8. Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	4,76	4,90	4,97	5,05
9. Jasa-jasa	8,29	8,68	8,55	8,35
PDRB	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

3.3.2 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Tahun 2012 Menurut Komponen Penggunaan

Komponen PDRB penggunaan yang tumbuh cukup signifikan dan memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah ekspor dan konsumsi rumah tangga. Ekspor tumbuh sebesar 11,55 % dengan sumber pertumbuhan sebesar 5,66 %, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 6,15 % dengan sumber pertumbuhan sebesar 4,32 %. Kenaikan ekspor selama tahun 2012 antara lain didorong oleh adanya peningkatan permintaan barang-barang produksi Jawa Timur seperti produk barang dari kayu, produk berupa alas kaki, produk penggilingan padi dan lain-lain untuk memenuhi permintaan dari provinsi lain terutama antar pulau di wilayah Indonesia timur. Sedangkan konsumsi rumah tangga naik pada periode yang sama karena adanya libur sekolah, hari natal dan tahun baru 2013 serta hari raya Idul Adha.

Komponen lembaga nirlaba selama 2012 tumbuh 5,74 % dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,04 %. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,39 % sumber pertumbuhan sebesar 0,99 %. Kenaikan PMTB antara lain didorong adanya penambahan belanja investasi barang modal publik yang terjadi selama tahun 2012 baik melalui APBN, APB Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota termasuk tambahan modal dari luar negeri antara lain mesin, alat angkutan dan sebagainya. Dari pertumbuhan maupun sumber pertumbuhan masing-masing komponen, Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 66,61 %, Konsumsi pemerintah sebesar 6,85% dan PMTB sebesar 20,11 %.

Tabel 3.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Menurut Penggunaan
Januari – Desember 2012
(persen)

Komponen Penggunaan	Trw IV 2012 Thd trw IV 2011 (<i>y-on-y</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)	Trw IV 2012 thd trw III 2012 (<i>q-to-q</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Jan-Des 2012 Thd Jan-Des 2011 (<i>c-to-c</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>c-to-c</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah tangga	6,57	4,67	1,75	1,21	6,15	4,32
2. Konsumsi Lbg Swasta Nirlaba	4,49	0,03	1,86	0,01	5,74	0,04
3. Konsumsi Pemerintah	-4,06	-0,34	6,27	0,44	0,24	0,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,80	1,63	4,17	0,75	5,39	0,99
5. Perubahan Inventori	39,86	-0,52	-188,31	-3,58	80,32	0,81
6. Ekspor Barang dan Jasa	12,97	6,63	5,22	2,66	11,55	5,66
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,36	5,02	4,37	2,08	9,82	4,58
PDRB	7,09	7,09	-0,60	-0,60	7,27	7,27

3.1.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2013

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah 5,5%-6,0%. Pertumbuhan tersebut optimis dapat tercapai dan diperkirakan mencapai 7,5%-7,7% sebagaimana target yang telah disesuaikan (*adjustment*) dengan tingkat inflasi yang diperkirakan pada kisaran $5 \pm 1\%$ karena pengaruh tekanan kenaikan tarif listrik, gas elpiji dan kemungkinan pengurangan subsidi BBM.

Pertumbuhan kredit yang berada di kisaran 12% s.d. 23% serta pertumbuhan DPK di kisaran 10% s.d. 21% diharapkan mampu mendorong perekonomian di Jawa Timur serta menggerakkan perbankan yang lain untuk berkompetisi secara sehat. Dengan target tersebut, LDR ditargetkan berada di kisaran 86% s.d. 95% (lihat PBI terkait Giro Wajib Minimum/GWM berapa range nya !!!!!) yang mencerminkan titik optimal fungsi intermediasi perbankan. Dengan tingkat pertumbuhan kredit UMKM yang mencapai 11% s.d. 26%, diharapkan dapat meningkatkan share kredit UMKM pada kisaran 30% s.d. 35%, meningkat dari posisi triwulan IV-2012 yang mencapai 28,62% (Bank Indonesia, 2013).

Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

1) Lingkungan eksternal (Global)

Pertama, Krisis global yang telah berjalan empat tahun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, namun kondisi perekonomian global tetap rapuh, dan pertumbuhan di negara-negara berpendapatan tinggi masih lemah. Laporan *Global Economic Prospects* Bank Dunia menjelaskan, negara-negara berkembang perlu meningkatkan potensi pertumbuhan ekonominya dan perlu melindungi diri dari resiko-resiko yang bisa muncul akibat krisis di Eropa dan Amerika Serikat.

Kedua, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang sampai saat ini belum terselesaikan, kedepan masih memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia, juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditi lainnya. Hal ini menuntut perekonomian dengan sumber pertumbuhan yang meluas serta terbangunnya Ketahanan Pangan dan Energi Masyarakat Ekonomi

ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Implementasi kesepakatan AEC pada tahun 2015 akan mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur, sehingga harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik dan mendorong daya saing produk daerah di pasar domestik maupun luar negeri.

Ketiga, Berlarut-larutnya penyelesaian pemulihan krisis ekonomi di kawasan Eropa dan AS masih akan menghambat ekspansi pertumbuhan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin berlanjut pada awal tahun 2013 hingga mendekati Rp.10.000/US\$ di satu sisi membuat harga produk ekspor Indonesia bertambah kompetitif dan di sisi lain dapat menahan pembelian domestik terhadap produk impor yang harganya semakin tinggi.

2) Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama, Kinerja perekonomian nasional tahun 2012 dengan ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu, memberikan potensi yang cukup besar bagi perekonomian nasional tahun 2013 untuk terus tumbuh dan mencapai target makro ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan sebesar 6,8% dan tingkat inflasi sebesar 4,9%. Kekuatan pasar domestik dan arus investasi yang semakin meningkat seiring dengan pengakuan rating *investment grade* oleh lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody dan Fitch, merupakan modal utama pertumbuhan.

Kedua, Perkembangan makro ekonomi nasional menunjukkan hal yang optimis ditengah perbaikan pengaruh krisis eksternal. Beberapa indikator ekonomi utama, seperti neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2013 inflasi diperkirakan sebesar 5 %. Suku bunga acuan (SPN 3 bulan) tetap dijaga pada suku bunga riil 1-2 % di atas inflasi dengan suku bunga nominal sama dengan suku bunga riil ditambah dengan ekspektasi inflasi. Penetapan suku bunga acuan disesuaikan dengan situasi keuangan global maupun perkembangan harga-harga dalam negeri (Laporan Bank Indonesia).

Ketiga, Beban alokasi subsidi energi dalam APBN TA 2013 yang mencapai Rp. 274,7 trilyun (subsidi BBM Rp 193,8 trilyun dan

subsidi listrik Rp 80,9 trilyun) berpotensi untuk bertambah apabila konsumsi BBM melebihi pagu 46 juta kl dan tidak dilakukan penyesuaian harga. Selain itu keterbatasan produksi minyak dalam negeri (*lifting* minyak tahun 2012 hanya mencapai 861 ribu barel per hari) menyebabkan Indonesia lebih banyak mengimpor BBM (*net importer*) (Setneg RI, 2013).

Keempat, Agenda pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 akan mempengaruhi kinerja ekonomi misalnya pasar modal dan investasi. Pelaku usaha cenderung akan menunggu hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, transaksi perdagangan cenderung akan menurun sampai terpilihnya anggota legislatif dan presiden, sehingga kondusifitas situasi sosial politik terkait kedua agenda tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

3) Lingkungan Internal (Provinsi)

Pertama, Indikator makro ekonomi menunjukkan kecenderungan yang semakin baik sejak pertumbuhan Jawa Timur tahun 2009 sebesar 5,10% yang melebihi nasional sebesar 4,5%, kemudian di Tahun 2010 tumbuh 6,68% juga melebihi nasional sebesar 6,10%. Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Timur meningkat sebesar 7,22 %tahun 2010 (c-to-c). Pada Tahun 2012 tumbuh menjadi 7,27%. Kinerja tersebut menjadi kondusif, ketika inflasi pada tahun 2012 berada pada posisi 4,50 %.

Kedua, Permintaan domestik Jawa Timur yang mencapai 66,61 % saat ini menunjukkan kekuatan fundamental , ketika lingkungan eksternal masih mengalami distorsi baik di Eropa, Amerika Serikat serta krisis di Timur Tengah. Oleh karena itu keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) menjadi pendukung yang efektif untuk menjaga permintaan domestik akan barang-barang produksi Jawa Timur.

Ketiga, Berbagai kerangka regulasi yang menjadi stimulan dalam percepatan ekonomi di Jawa Timur antara lain :

1. Jaminan investasi pemerintah propinsi baik dalam hal: (a) iklim perburuhan yang demokratis, (b) surplus energi listrik, (c) fasilitasi pengadaan tanah untuk investor dan (d) pelayanan perijinan satu pintu (PTSP) oleh UPT P2T akan mampu mempercepat investasi langsung (*direct investment*) baik domestik maupun asing.

2. Sistem kapitasi yang berpihak pemberdayaan sektor riil, koperasi dan UMKM, yang diindikasikan dengan (a) tuntasnya pembentukan lembaga keuangan mikro pedesaan/kelurahan sebanyak 8.506 koperasi wanita sampai dengan tahun 2010 dan direncanakan penambahan modal kembali terhadap kopwan berprestasi, LMDH, Koppontren dan Koperasi Karyawan, (b) *linkage* program Bank Jatim-BPR, (c) penjaminan kredit bagi UMKM yang layak namun kurang memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, yaitu PT Jamkrida.

Keempat, Percepatan berbagai pembangunan infrastruktur, antara lain :

- a. Pembangunan rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi di Jawa Timur, meliputi :

- 1) Percepatan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Socah di Kabupaten Bangkalan;
- 2) Percepatan debottle-necking pada ruas-ruas jalan eksisting dan percepatan pembebasan tanah pada pembangunan Jalan Tol dan JLS dimana lahan yang digunakan untuk pembangunan JLS memanfaatkan lahan milik Perhutani.
- 3) Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, dimana JLS kabupaten Pacitan tuntas tahun 2014.
- 4) Mendorong rencana pembangunan jalan nasional meliputi pelebaran, peningkatan struktur jalan, pembangunan jalan baru, pembangunan jalan dan jembatan lintas Selatan serta penggantian Jembatan diantaranya :
 - penambahan panjang ruas jalan nasional di Jawa Timur
 - realisasi percepatan pelaksanaan program nasional terkait sertifikasi BPN terhadap aset daerah dalam hal pembangunan jalan.
 - realisasi percepatan pelaksanaan debottle-necking 6 jembatan jalan raya Surabaya-Gresik dan realisasi pembangunan jalan layang sebagai akses dari Teluk Lamong menuju jalan tol Surabaya – Gresik dan jalan non tol;
 - realisasi percepatan pelaksanaan Jalan tembus Lawang-Batu.

- 5) Rencana Pembangunan Jalan yang mendukung Kawasan Wisata Bromo - Semeru – Tengger, pada Ruas Jalan Tongas - Sukapura – Ngadisari berupa Pelebaran dan Peningkatan Struktur sepanjang 35 Km;
 - 6) Rencana Pembangunan Jalan yang mendukung Transportasi menuju pelabuhan pelelangan ikan di wilayah Malang Selatan, Ruas Jalan Sendang Biru - Jarit – Puger.
- b. Pembangunan infrastruktur transportasi, meliputi :
- 1) Peningkatan kapasitas prasarana Terminal tipe A pada simpul-simpul aktivitas ekonomi yang sedang berkembang dan peningkatan kinerja pelayanan dan kapasitas Prasarana Terminal Penumpang Tipe A pada Terminal Arjosari Malang, Terminal Ponorogo, Terminal Madiun, Terminal Paciran Lamongan, Terminal Bangkalan dan Terminal Probolinggo.
 - 2) Pembangunan Jembatan Timbang Baru di wilayah Jenu Kabupaten Tuban dan relokasi Jembatan Timbang Mojoagung sebagai akibat pembangunan Ring Road Mojokerto dalam rangka memperlancar aksesibilitas transportasi angkutan barang yang menuju ke Jawa Timur maupun sebaliknya,
 - 3) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan
 - 4) Peningkatan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Alarm Early Warning Sistem (AEWS) serta Rambu di perlintasan sebidang
 - 5) Pengembangan pelabuhan laut di :
 - Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo
 - Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi.
 - Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan
 - Pelabuhan Boom di Kabupaten Banyuwangi
 - Pelabuhan Gilimandagin di Kabupaten Sampang
 - Pelabuhan Giliraja di Kabupaten Sumenep
 - 6) Internasionalisasi Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang dan Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Banyuwangi

Kelima, Sistem kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik dengan berbagai skema antara lain :

1. Penguatan kelembagaan 24 Perwakilan dagang di 24 Provinsi kerjasama domestik yang diarahkan pada *business inteligent* untuk membantu penetrasi perdagangan dalam negeri.
2. Kerjasama *sister province* maupun *non sister province* untuk tujuan *capital inflow* maupun memperluas pasar ekspor ke negara potensial maupun negara non konvensional.
3. MoU dengan BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional/Internasional dalam hal optimalisasi pemanfaatan dana CSR/PKBL.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian 2014 dan 2015

Dengan kemajuan perekonomian yang dicapai pada tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2013, maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

1. *Globalisasi* perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui *international trade friendship*. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan.
2. *Pengurangan Pengangguran*

Pertumbuhan angkatan kerja baru akan menjadi tantangan kinerja ekonomi. Dengan dominasi ekonomi di sektor konsumsi, kinerja ekonomi kedepan diharapkan akan mampu didukung oleh pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto serta net ekspor yang signifikan untuk dapat mengatasi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu kinerja perbankan, kinerja investasi (*capital inflow/fresh money*), percepatan pembangunan infrastruktur merupakan serangkaian faktor diharapkan sinergi untuk membangun ekonomi Jawa Timur.

3. *Pengurangan Kemiskinan*

Sampai dengan bulan September 2012, jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4,961 juta jiwa (13,08 %) atau turun 2,18 % dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang mencapai 5,071 juta jiwa (13,40 %). Upaya secara kelembagaan, program dan berbagai sumber dana telah dilakukan. Secara konseptual, diharapkan implementasi pembangunan ekonomi akan mampu dalam jangka panjang menurunkan kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan mampu mengurangi kemiskinan.

4. *Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*

Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya (*labour intensive industry*). Pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas dan pengurangan pengangguran merupakan instrumen korelatif dari percepatan pertumbuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu basis investasi dan ekspor merupakan variabel penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan dengan distribusi pendapatan yang merata dan mampu mengurangi disparitas.

5. *Penanganan Bencana Alam*

Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi (*un-predictable*), namun bisa juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang

diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam), manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2014 dan Tahun 2015

Sejak 2009 dalam koridor perencanaan RPJMD 2009-2014, hingga tahun keempat 2012, kinerja ekonomi di Jawa Timur menunjukkan percepatan dan selalu diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai mencapai 5,01% diatas nasional 4,5%, tahun 2010 tumbuh 6,68% diatas nasional 6,10%, pada tahun 2011 tumbuh 7,22% diatas nasional 6,5% dan pada tahun 2012 tumbuh 7,27% diatas nasional 6,23%, Untuk tahun 2013 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,5-7,7%, sedangkan pada tahun 2014 dengan asumsi berbagai proyek infrastruktur pada tahap penyelesaian, terdapat solusi energi khususnya gas, diperkirakan ekonomi Jawa Timur akan mampu tumbuh pada kisaran 7,5-7,7%.

Struktur ekonomi Jawa Timur tahun 2014 dan 2015, jika ditinjau berdasarkan pengaruh eksternalitas krisis utang Eropa dan Amerika yang sampai saat ini masih terjadi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan masih akan ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Meski mengalami gejolak akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, dari sisi moneter tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim, namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi. Disisi lain kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Jawa Timur tahun 2014 dan 2015. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan pada kisaran 6 ± 1 % per tahun, maka prospek ekonomi Jawa Timur 2014 dan 2015 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 7,5-7,7% dan tahun 2015 diperkirakan tetap pada kisaran 7,5-7,7%.

Di bidang pembiayaan sektor riil, diharapkan bank-bank di Jawa Timur dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri secara eksplisit telah menunjukkan keberpihakan terhadap sektor riil dengan berbagai skema pendanaan baik melalui kredit bunga rendah, penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT Jamkrida, penguatan lembaga keuangan mikro (8.506 Koperasi Wanita) dan tambahan penguatan permodalan bagi koperasi yang berkinerja baik.

3.1.3. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai sub sistem pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada 2 fondasi utama, yaitu: (a) stabilitas makro baik fiskal maupun moneter, (b) sektor riil yang menjadi basis peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja di 9 sektor lapangan usaha. Kebijakan ekonomi Jawa timur tidak hanya mengejar percepatan, namun lebih diarahkan menuju pertumbuhan yang inklusif yang dibangun dari kualitas fundamental ekonomi mapun berorientasi pada pengurangan disparitas antar wilayah maupun disparitas pendapatan masyarakat.

Dengan konstruksi tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan mampu diwujudkan dan memberikan dampak terhadap kinerja penurunan pengangguran terbuka, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM serta penurunan disparitas wilayah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Dibiidang makro ekonomi, diarahkan agar inflasi berada pada batas kondusif 5 ± 1 % dengan mengoptimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta stimulasi berupa intervensi pasar terhadap komoditi tertentu pada situasi tertentu baik melalui subsidi ongkos angkut, operasi pasar dan kegiatan lain yang dapat menekan laju inflasi.
- 2) Di bidang kerangka regulasi/kebijakan, 4 jaminan investasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di bidang pelayanan perijinan, kebijakan peningkatan belanja modal termasuk belanja modal non aset (hibah barang modal ke kelompok masyarakat), merupakan serangkaian kebijakan

untuk mampu menstimulasi kinerja ekonomi.

- 3) Strategi daya saing diarahkan untuk meningkatkan fasilitasi/stimulasi kualitas produk primer, sekunder maupun tersier serta efektifitas proses produksi untuk menciptakan daya saing global, khususnya dalam jangka pendek menghadapi pasar bersama ASEAN (*Asean Economic Community*).
- 4) Di bidang pembiayaan sektor riil, kebijakan pembiayaan sektor riil diarahkan pada :
 - a) Mendorong Bank Indonesia agar implementasi di bidang kebijakan moneter baik Giro Wajib Minimum (GWM), Pengumuman Suku Bunga Bank Referensi untuk mampu mendorong peningkatan LDR khususnya bagi pembiayaan sektor riil di Jawa Timur.
 - b) Mengoptimalkan *linkage* PT Bank Jatim – PT Bank UMKM untuk pembiayaan sektor mikro dan kecil
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan PT Jamkrida dalam hal penjaminan kredit UMKM .
 - d) Mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan mikro di pedesaan/kelurahan melalui Koperasi Wanita.
 - e) Mendukung kelancaran dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 5) Di bidang Investasi, diarahkan pada :
 - a. Mengoptimalkan promosi investasi disertai dengan dukungan 4 jaminan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur,
 - b. Mendorong percepatan realisasi investasi dari ijin – ijin prinsip yang telah mendapatkan persetujuan,
 - c. Investasi asing diarahkan untuk berorientasi ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan kandungan lokal yang semakin meningkat melalui kontribusi dari sektor perdagangan luar negeri, investasi dalam negeri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional serta insentif bagi investasi yang mendukung hilirisasi industri.
- 6) Di Bidang Produksi dan produktivitas sektor pertanian diarahkan pada :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung percepatan swasembada lima komoditas pangan strategis

nasional, yaitu padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging, dan peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

- b. Sosialisasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
 - c. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas produk dengan perbaikan dan penerapan budidaya dan pengelolaan pasca panen dengan sistem agribisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - d. Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.
 - e. Optimalisasi dan mendorong Kab/Kota untuk memaksimalkan penyediaan APPO.
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Pembelian gabah melalui program DAGULIR.
 - h. Pembangunan lumbung pangan dan bantuan modal untuk pengisian lumbung.
 - i. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - j. Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan mengutamakan peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
 - k. Penanganan rehabilitasi dalam kawasan dan di luar kawasan Tahura R. Soerjo.
- 7) Di bidang Industri dan Perdagangan, diarahkan pada :
- a. Peningkatan produksi melalui pemanfaatan kapasitas terpasang dan diversifikasi/rintisan pengembangan industrialisasi bahan baku substitusi impor,
 - b. Keterkaitan rantai pasok dan/atau Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas hulu
 - c. Peningkatan Kualitas SDM, Mutu & Standarisasi Industri serta peningkatan Kapasitas Teknologi, dalam rangka peningkatan daya saing.
 - d. Integrasi industri prioritas daerah dengan kegiatan ekonomi utama MP3EI koridor Jawa, di Jawa timur yang fokus pada Industri Makanan dan Minuman, Industri Perkapalan, Industri Alutsista, Industri Telematika serta Migas dan

Kondensat.

- e. Debirokratisasi manajemen pada pelayanan Ekspor-Import di Pelabuhan/Bandara menuju peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan (single window service)
 - f. Optimalisasi penetrasi pasar di pasar ekspor konvensional yang potensi pertumbuhan ekonominya meningkat (Jepang dan China) maupun pasar ekspor non konvensional (Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan dan Amerika Selatan), serta pasar domestik di luar provinsi/antar pulau.
 - g. Penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menanggulangi praktek persaingan usaha tidak sehat.
 - h. Pengembangan efisiensi jejaring input-output distribusi perdagangan konvensional (pasar daerah) dan pasar lelang agrobisnis serta pasar induk agrobisnis.
 - i. Pengendalian harga komoditas bahan makanan pokok
 - j. Peningkatan nilai tambah perdagangan komoditas tertentu melalui sistem tunda jual pada sistem resi gudang.
- 8) Di bidang ekonomi kreatif, diarahkan dengan mengoptimalkan potensi melalui fasilitasi di bidang pembiayaan maupun kualitas produk serta pemasaran. Perlindungan terhadap hasil karya UMKM (HAKI).
- 9) Di Sektor UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk mengoptimalkan peran kopeasi dan UMKM terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, penguatan kelembagaan serta peningkatan usaha bagi Koperasi dan UMKM.
- 10) Di bidang infrastruktur dan transportasi, diarahkan untuk (a) Peningkatan Jalan Provinsi dari **kondisi rusak ringan dan rusak berat** menjadi **kondisi mantap**, Penanganan seluruh JalanProvinsi kondisi mantap dengan pemeliharaan rutin,Debottlenecking dan Standarisasi pelebaran JalanProvinsi serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang telah termuat dalam komitmen khusus antara lain program RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) / Road Safety dalam menangani blackspot / rawan kecelakaan serta rawan bencana dalam upaya menurunkan tingkat fatalitas (b) mengembangkan jaringan transportasi antar wilayah di Jawa Timur dengan wilayah lain di Indonesia dan antar daerah Jawa Timur (c) peningkatan

kapasitas Terminal tipe A dan tipe B serta Jembatan Timbang (d) pengembangan pelabuhan laut di Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Pelabuhan Socah dan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Giliraja, Pelabuhan Sapudi, Pelabuhan Keramaian di Sumenep, Pelabuhan Kalbut di Situbondo, Pelabuhan Gilimandagin, Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Taddan di Sampang, Pelabuhan Telaga Biru di Bangkalan, Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Kalbut di Situbondo, serta Pelabuhan Brondong di Lamongan serta Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang,) Peningkatan fasilitas operasional Bandara ABD Saleh Malang dan Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi. Sedangkan dibidang Infrstruktur Pengairan diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi padi melalui revitalisasi waduk di berbagai Daerah Aliran Sungai.

- 11) Di bidang energi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan peningkatan produktivitas industri melalui rencana-rencana pembangunan refinery, regastrifikasi, percepatan penyelesaian pembangunan PLTU (panas bumi), pembangkit listrik dengan sumber energi alternatif (energi baru terbarukan/EBT).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.2.1. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaran pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan serta daerah optimalisasi kontribusi BUMD.

Sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2014, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD 2014	PERKIRAAN MAJU 2015	PERKIRAAN MAJU 2016
		2011	2012	2013	2013			
1	PENDAPATAN DAERAH	9.907.001.026.685,00	11.523.016.693.156,00	14.857.728.649.468,00	14.996.873.944.645,00	17.063.618.132.667	18.275.892.978.550	19.598.714.566.728
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.615.042.879.117,00	9.068.160.048.588,00	9.523.901.967.476,00	9.523.901.967.476,00	11.729.791.450.675	12.815.611.023.209	14.005.654.574.369
1.1.1	PAJAK DAERAH	6.120.000.000.000,00	7.502.400.000.000,00	7.863.719.633.500,00	7.863.719.633.500,00	9.986.600.000.000	10.985.260.000.000	12.083.786.000.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	56.357.559.100,00	123.663.970.000,00	126.405.755.500,00	126.405.755.500,00	132.726.043.275	139.362.345.439	146.330.462.711
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	315.158.897.817,00	320.317.073.588,00	328.891.596.516,00	328.891.596.516,00	345.336.176.342	362.602.985.159	380.733.134.417
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.123.526.422.200,00	1.121.779.005.000,00	1.204.884.981.960,00	1.204.884.981.960,00	1.265.129.231.058	1.328.385.692.611	1.394.804.977.241
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.267.158.147.568,00	2.408.974.064.568,00	2.518.489.768.957,00	2.606.703.364.134,00	2.518.489.768.957	2.644.414.257.405	2.776.634.970.275
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	864.625.248.568,00	864.625.248.568,00	800.197.051.957,00	888.410.647.134,00	800.197.051.957	840.206.904.555	882.217.249.783
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.347.501.699.000,00	1.491.561.136.000,00	1.632.648.287.000,00	1.632.648.287.000,00	1.632.648.287.000	1.714.280.701.350	1.799.994.736.418
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	55.031.200.000,00	52.787.680.000,00	85.644.430.000,00	85.644.430.000,00	85.644.430.000	89.926.651.500	94.422.984.075
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.800.000.000,00	45.882.580.000,00	2.815.336.913.035,00	2.866.268.613.035,00	2.815.336.913.035	2.815.867.697.937	2.816.425.022.084
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	24.800.000.000,00	23.300.000.000,00	10.615.698.035,00	10.615.698.035,00	10.615.698.035	11.146.482.937	11.703.807.084
1.3.2	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	22.582.580.000,00	2.804.721.215.000,00	2.855.652.915.000,00	2.804.721.215.000	2.804.721.215.000	2.804.721.215.000
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0
1.3.6	DANA URUSAN BERSAMA	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pendapatan daerah	9.907.001.026.685,00	11.523.016.693.156,00	14.857.728.649.468,00	14.996.873.944.645,00	17.063.618.132.667	18.275.892.978.550	19.598.714.566.728

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2014 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD	PERKIRAAN MAJU	PERKIRAAN MAJU
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
2	BELANJA DAERAH	10.626.361.387.552	12.214.783.359.822	15.356.564.202.217	15.356.564.202.217	17.746.162.857.974	19.006.928.697.692	20.382.663.149.397
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.797.640.027.698	6.608.154.642.841	9.340.218.708.293	9.340.218.708.293	13.041.218.345.974	13.607.214.651.319	13.940.093.251.816
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.497.004.813.695	1.668.623.319.850	1.725.859.316.000	1.725.859.316.000	1.898.445.247.600	2.088.289.772.360	2.297.118.749.596
2.1.2	BELANJA BUNGA	4.878.211.780	6.139.011.401	5.516.766.111	5.516.766.111	5.516.766.111	5.516.766.111	5.516.766.111
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	BELANJA HIBAH	974.301.072.000	1.067.322.005.000	4.193.687.850.000	4.193.687.850.000	4.338.710.267.500	4.623.540.854.625	4.854.717.897.356
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	87.714.900.000	31.358.000.000	77.198.000.000	77.198.000.000	32.925.900.000	81.057.900.000	81.057.900.000
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.229.468.218.036	2.292.840.281.343	2.372.920.511.382	2.372.920.511.382	4.452.599.787.729	4.897.859.767.986	5.387.645.757.536
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA	963.160.438.765	1.490.172.025.247	903.036.264.800	903.036.264.800	2.263.020.377.034	1.860.949.590.238	1.264.036.181.216
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.112.373.422	51.700.000.000	62.000.000.000	62.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.828.721.359.854	5.606.628.716.981	6.016.345.493.924	6.016.345.493.924	4.704.944.512.000	5.399.714.046.373	6.442.569.897.581
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	833.869.936.141	957.619.879.155	1.081.354.807.410	1.081.354.807.410	865.083.845.928	994.846.422.000	1.144.073.385.000
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.094.388.943.127	3.604.242.122.393	3.942.848.122.869	3.942.848.122.869	2.681.136.723.551	2.949.250.395.297	3.391.637.942.492
2.2.3	BELANJA MODAL	900.462.480.586	1.044.766.715.433	992.142.563.645	992.142.563.645	1.158.723.942.521	1.455.617.229.076	1.906.858.570.089
	Jumlah belanja daerah	10.626.361.387.552	12.214.783.359.822	15.356.564.202.217	15.356.564.202.217	17.746.162.857.974	19.006.928.697.692	20.382.663.149.397

3.2.2. Arah Kebijakan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Pembangunan Daerah

3.2.2.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2009-2012 menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dengan meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah obyek pajak sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 diarahkan pada :

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah yang diarahkan pada :

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah

- Melakukan langkah dan upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan Pajak Daerah.
- Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/ Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga sertifikasi Internasional seperti ISO.
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan keahlian.

2. Extensifikasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah

- Mengembangkan pendapatan daerah dengan minimalkan timbulnya resiko distortif atas pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perekonomian daerah
- Pemungutan pajak rokok sebagai obyek pajak daerah baru yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.
- Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana

perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah.

- b. Advokasi kepada pemerintah pusat agar dalam memberikan dana transfer ke daerah (DAU, DAK dan Dana bagi Hasil) juga mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.
 - Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana perimbangan terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah.
- c. Meningkatkan kontribusi laba BUMD pada Pendapatan Asli Daerah melalui upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.
 - Tata kelola BUMD yang lebih efektif dan efisien.
 - Extensifikasi usaha BUMD.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2014 dititikberatkan kepada kebutuhan masyarakat khususnya pada fungsi pelayanan dasar dan bidang-bidang yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian daerah sehingga bisa memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraanya. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2014 diarahkan pada :

- a. Belanja Daerah dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan serta layanan sosial dasar lainnya.
- b. Belanja Daerah sebagai stimulus pembangunan bidang ekonomi sektor produktif dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal serta pengembangan konektivitas antar daerah sebagai jejaring pemasaran dan peningkatan daya saing.

- c. Belanja Daerah dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap perekonomian setempat.
- d. Belanja daerah dalam rangka mendukung pemeliharaan stabilitas sosial dan politik untuk mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014.
- e. Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja program umum (ex rutin) dengan di dasari prinsip efektivitas dan efisien dan berdaya guna.
- f. Belanja Daerah dalam rangka fasilitasi belanja tak terduga, termasuk untuk kegiatan yang mendesak penanganan bencana alam.
- g. Belanja Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun Komposisi Belanja Langsung yang dialokasikan di seluruh SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tercermin dalam pagu indikatif Tahun 2014 sebagai berikut :

TABEL 3.8
Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2014

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
	URUSAN WAJIB	3.957.841.660.000,00
	Pendidikan	342.433.465.000,00
1	Dinas Pendidikan	342.433.465.000,00
	Kesehatan	1.249.127.486.000,00
2	Dinas Kesehatan	49.872.353.000
3	RS Khusus Paru-Paru Batu	16.034.195.000
4	RSK. Paru-Paru Jember	11.065.000.000
5	RSK. Paru-Paru Dungus Madiun	5.500.000.000
6	RSK Kusta Kediri	8.168.033.000
7	RSK. Kusta Sumberg. Mojokerto	23.058.451.000
8	BKMM Surabaya	22.450.000.000
9	BP 4 Surabaya	11.715.391.000
10	BP 4 Pamekasan	5.300.000.000
11	BP 4 Madiun	5.650.000.000
12	UPT- Akademi Keperawatan Madiun	3.656.000.000
13	UPT- Akademi Gizi Surabaya	3.460.000.000
14	UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang	4.350.000.000
15	RSU Dr. Soetomo Surabaya	567.694.089.000
16	RSU. Dr. Syaiful Anwar Malang	270.560.000.000

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
17	RSU. Dr. Soedono Madiun	102.894.963.000
18	Rumah Sakit Haji Surabaya	106.163.011.000
19	RS Jiwa Menur Surabaya	31.536.000.000
	Pekerjaan Umum	606.397.327.000,00
20	DPU Bina Marga	409.000.000.000
21	DPU Pengairan	167.113.000.000
22	DPU Cipta Karya dan Tataruang	30.284.327.000
	Perencanaan Pembangunan	77.080.000.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77.080.000.000
	Perhubungan	210.684.536.000,00
24	Dinas Perhubungan dan LLAJ	210.684.536.000
	Lingkungan Hidup	17.497.000.000,00
25	Badan Lingkungan Hidup	17.497.000.000
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.245.250.000,00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13.245.250.000
	Sosial	64.340.689.000,00
27	Dinas Sosial	64.340.689.000
	Ketenagakerjaan	57.025.000.000,00
28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	57.025.000.000
	Koperasi dan U K M.	158.050.000.000,00
29	Dinas Koperasi dan UMKM	158.050.000.000
	Penanaman Modal	37.222.000.000,00
30	Badan Penanaman Modal	37.222.000.000
	Kebudayaan	58.602.395.000,00
31	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	58.602.395.000
	Kepemudaan dan Olah Raga	25.123.300.000,00
32	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	25.123.300.000
	Kesbang & Politik Dalam Negeri	37.223.623.000,00
33	Bakesbang & Politik	14.133.523.000
34	Satuan Polisi Pamong Praja	11.997.400.000
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.092.700.000
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keu Drh, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	837.605.197.000,00
36	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
37	Kepala Daerah dan Wk. KDH	-
38	Biro Adm. Pemerintahan Umum	9.015.000.000
39	Biro Adm. Kerjasama	11.140.000.000
40	Biro Hukum	6.540.000.000
41	Biro Adm. Perekonomian	30.000.000.000
42	Biro Adm. Pembangunan	14.815.000.000
43	Biro Adm. Sumber Daya Alam	20.000.000.000
44	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat	8.146.119.000
45	Biro Adm. Kemasyarakatan	14.168.773.000
46	Biro Humas dan Protokol	19.973.480.000
47	Biro Organisasi	10.665.000.000

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
48	Biro Umum Setda	61.282.582.000
49	Sekretariat DPRD	134.623.102.000
50	Badan Penelitian dan Pengembangan	14.200.000.000
51	Inspektorat Provinsi Jatim	16.900.000.000
52	Dinas Pendapatan	256.701.612.000
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	119.067.677.000
54	Kantor Perwakilan	11.000.000.000
55	Badan KPPP Wilayah I Madiun	5.047.836.000
56	Badan KPPP Wilayah II Bojonegoro	5.067.000.000
57	Badan KPPP Wilayah III Malang	5.107.000.000
58	Badan KPPP Wilayah IV Pamekasan	5.350.000.000
59	Badan Kepegawaian Daerah	15.225.664.000
60	Badan Pendidikan dan Pelatihan	32.169.352.000
61	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	11.400.000.000
	Ketahanan Pangan	65.000.000.000,00
62	Badan Ketahanan Pangan	65.000.000.000
	Pemberdayaan Masy. Desa	47.339.392.000,00
63	Badan Pemberdayaan Masyarakat	47.339.392.000
	Komunikasi dan Informatika	30.045.000.000,00
64	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.555.000.000
65	Sekretariat K P I D	5.490.000.000
	Perpustakaan	23.800.000.000,00
66	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	23.800.000.000
	URUSAN PILIHAN	747.102.852.000,00
	Pertanian	352.000.000.000,00
67	Dinas Pertanian	144.000.000.000
68	Dinas Perkebunan	100.000.000.000
69	Dinas Peternakan	108.000.000.000
	Kehutanan	32.350.000.000,00
70	Dinas Kehutanan	32.350.000.000
	Energi dan Sumberdaya Mineral	22.450.000.000,00
71	Dinas Energi dan SDM	22.450.000.000
	Kelautan dan Perikanan	175.180.758.000,00
72	Dinas Perikanan dan Kelautan	175.180.758.000
	Industri	165.122.094.000,00
73	Dinas Perindustrian dan Perdag.	165.122.094.000
	JUMLAH	4.704.944.512.000,00

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pembangunan daerah khususnya sektor publik yang menjadi tanggung tanggungjawab pemerintah daerah, dalam pelaksanaanya diharapkan mampu menjadi pendorong dan pengungkit bagi sektor *private* untuk tetap tumbuh dan terus berkembang melalui kebijakan *government expenditure*. Kebijakan

ini juga diarahkan untuk dapat memberikan efek simultan pada roda perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kebijakan pengeluaran pemerintah daerah juga ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang dari waktu ke waktu terus menuntut peningkatan kualitas layanannya. Isu-isu tentang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perekonomian sektor produktif serta aspek kehidupan masyarakat yang lain harus menjadi prioritas.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung oleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap diarahkan mampu menjadi *back bone* Pendapatan Daerah. Intensifikasi Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor perlu mendapat perhatian, agar kebijakan yang dirumuskan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah tidak berakibat kontra produktif. Misalnya pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor justru berpeluang meningkatkan tunggakan pajak oleh karena ada hambatan administratif bagi wajib pajak dalam proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengingat sebagian besar kendaraan dalam kondisi terikat perjanjian kredit. Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus dikembangkan disamping memperkuat sumber-sumber yang telah ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah ini juga perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul atas hal tersebut. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diharapkan tetap mampu menjaga iklim usaha yang prospektif di Jawa Timur.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Potensi-potensi penerimaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah, Hasil penjualan kekayaan daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang dan Pencairan dana

cadangan hendaknya dicermati dari sisi positif maupun negatifnya. Pada saat anggaran ditetapkan menggunakan sistem defisit maka penerimaan daerah merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan anggaran yang penggunaanya tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat.

Demikian pula pada saat APBD menggunakan sistem surplus maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembentukan dana cadangan, Pemberian pinjaman, Pembayaran pokok hutang, dan Investasi (Modal bergulir, Modal dasar dan Penyertaan Modal BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, efektifitasnya serta sebagai bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

1. Tantangan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pembiayaan pembangunan daerah termasuk dalam ruang lingkup hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu *scarcity* sumber daya dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah daerah menjadi isu di semua daerah sehingga diperlukan penerapan kebijakan skala prioritas dalam penyelenggaraannya. Tantangan pembiayaan pembangunan daerah tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan

1. Proporsi dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah belum mempertimbangkan Kapasitas fiskal daerah yang berbasis kebutuhan.
2. Regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada menurunnya potensi Pendapatan Daerah.

b. Skala prioritas belanja daerah

1. Lingkaran permasalahan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan mata rantai persoalan dan perlu penyelesaian secara komprehensif.

2. Karakteristik dan kultur masyarakat di Kabupaten/Kota yang heterogen.
 3. Disparitas antar wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Efektifitas pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah
1. Seberapa besar *benefit* yang di dapatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya atas pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah.
 2. Diperlukan pertimbangan yang cermat dengan skala prioritas tentang peruntukan pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah.

2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. APBD *surplus*

Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan profitabilitas, efisiensi dan skala kemampuan sumber Pendapatan Daerah.

2. APBD *defisit*

Penerapan APBD *defisit* perlu mempertimbangan *cost benefit*-nya. Belanja daerah yang melebihi kemampuan Pendapatan daerah ditutup dari berbagai sumber dalam pembiayaan daerah. Dalam hal ini sumber keuangan daerah untuk menutup kekurangan anggaran dapat berasal dari antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah, Hasil penjualan kekayaan daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang dan Pencairan dana cadangan.

Berdasarkan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD 2014	PERKIRAAN MAJU 2015	PERKIRAAN MAJU 2016
		2011	2012	2013	2013			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	857.885.360.867,00	800.000.000.000,00	867.923.590.906,00	867.923.590.906,00	682.544.725.307	731.035.719.142	783.948.582.669
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	828.639.940.367,00	800.000.000.000,00	867.923.590.906,00	867.923.590.906,00	682.544.725.307	731.035.719.142	783.948.582.669
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	29.245.420.500,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	PENERIMAAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.525.000.000,00	108.233.333.334,00	508.233.333.334,00	508.233.333.334,00	8.233.333.334	8.233.333.334	8.233.333.334
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0	0	0
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	87.525.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0	0	0	0
3.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	1.000.000.000,00	8.233.333.334,00	8.233.333.334,00	8.233.333.334,00	8.233.333.334	8.233.333.334	8.233.333.334
3.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG DIPERLUKAN	0	0	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	719.360.360.867,00	691.766.666.666,00	359.690.257.572,00	359.690.257.572,00	674.311.391.973	722.802.385.808	775.715.249.335

3.2.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pencapaian target kinerja pembangunan yang dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan, untuk mengatasi hal tersebut kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan diarahkan pada :

1. Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yaitu dengan mensinergikan pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan baik yang bersumber dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. melalui pengembangan pembiayaan pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing.
2. Kemitraan Pembiayaan Pemerintah dengan Swasta, melalui :
 - a. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/ *Public Private Partnership*, yaitu Pelibatan sector *private* dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain *build operate and transfer (BOT)*, *build transfer operate (BTO)*, *leases*, *concessions* diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan

mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, *joint monitoring*, dan pembinaan teknis.

3. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Kebijakan pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan pada bidang-bidang yang mempunyai derajat *certainity* yang tinggi utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.